

**PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LAWATA DALAM
PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA BIMA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

RIZKUN IMADUDDIN

NIM: 60800112041

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 22 Agustus 2017

Penyusun,

RIZKUN IMADUDDIN

NIM: 60800112041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima
Nama Mahasiswa : Rizkun Imaduddin
NIM : 60800112041
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


NUR SYAM AS, ST.,M.Si


RISMA HANDAYANI, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Mengetahui
MAKASSAR

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota


Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt.,M.Si
NIP. 19760603 200212 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima" yang disusun oleh Rizkun Imaduddin, NIM: 60800112041, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 15 Dzulkaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 08 Agustus 2017
15 Dzulkaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: Fadhil Surur, S.T., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir. Syahriar Tato, S.H., M.H., M.S	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syam Aksa, S.T., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Risma Handayani, S.IP., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag

NIP.19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tiada batas sehingga Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima” Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas baginda nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya dalam hidup berupa cahaya Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun waktu, tenaga dan pikiran telah diperjuangkan dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki demi terselesaikan skripsi ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, penghargaan dukungan dan cinta. Untuk ini penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar penulis terkhusus Ibunda Asni dan ayahanda Nasaruddin,BA , kakak dan adik tersayang Agus Sukahat, S.Kep.,Ns , Intan Mulyatin serta seluruh Keluarga yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materil

dari awal kuliah hingga selesainya tugas akhir ini. terima kasih untuk segala kehadiran (setiap canda tawa dan tangis), motivasi, dan dukungan semangat yang diberikan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof..Dr.H.Arifuddin,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
5. Ayahanda Dr.H.Muhammad Anshar,S.Pt.,M.Si., selaku ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta segenap staf lainnya.
6. Seluruh Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Uin Alauddin Makassar atas Ilmu yang diberikan kepada penulis semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
7. Bapak Nur Syam Aksa, S.T.,M.Si ,selaku pembimbing I yang begitu sabar dalam membimbing penulis serta meluangkan banyak waktunya untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan serta kemudahan dalam penyusunan tugas akhir.
8. Ibunda Risma Handayani, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah begitu sabar membimbing, mengarahkan serta meluangkan banyak waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

9. Bapak Dr.Ir.H. Syahriar Tato, M.Si.,M.H.,M.SP yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
10. Bapak Dr.H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
11. Bapak Dr.Wahyuddin G, M.Ag yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
12. Segenap staf Pemerintah Kota Bima dan staf Kantor Kecamatan Rasanae Barat serta instansi terkait yang telah memperlancar dalam proses pengambilan data.
13. Untuk Myratun Fuah, S.Pd selaku partner super kompak dan juga sebagai pembimbing ke tiga yang selalu setia menemani penulis serta yang tidak bosan-bosannya memberikan motivasi, arahan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
14. Untuk teman seperjuangan, **Moh.Zaidin, C.S.PWK, Nasrul Abdullah C.S.PWK, Mukhlis, C.S.PWK**, yang selalu memberikan semangat masukan kepada penulis dalam Penyusunan Tugas akhir ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan PWK yang telah memberikan dorongan dan semangat terutama PENTAGON (PWK 2012), terima kasih untuk kenangan yang diberikan selama 5 tahun masa kuliah, semoga persaudaraan kita dapat tetap terjalin

walaupun masa kuliah telah berakhir dan untuk teman-teman yang masih berjuang tetap semangat RAJAWALI KAMPUS.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mengarahkan kepada kesempurnaan. Penulis berharap semoga kehadiran Tugas Akhir ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota pada khususnya dan disiplin ilmu lain pada umumnya.

Makassar, Agustus 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR PETA.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pariwisata dalam Pengembangan Wilayah	10
B. Pariwisata dalam Dampak yang Ditimbulkan.....	17
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata.....	22

D. Peran Pariwisata dalam Pembangunan.....	26
E. Upaya Memaksimalkan Peran Pariwisata dalam Pembangunan.....	34
F. Strategi Pengembangan Wisata.....	36
G. Penelitian Terdahulu	41
H. Kerangka Pikir.....	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	45
C. Metode Pengumpulan Data.....	46
D. Variabel Penelitian.....	47
E. Metode Analisis	48

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Bima.....	53
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rasanae Barat	65
C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	68
D. Peran Objek Wisata Pantai Lawata dalam Mendukung Sektor Kepariwisataan di Kota Bima	82
E. Pengaruh Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Mendukung Pengembangan Wilayah di Kota Bima.....	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian	47
Tabel 2. Luas Wilayah Kota Bima Dirinci Per Kecamatan Tahun 2016	54
Tabel 3. Tabel Data Obyek Wisata Kota Bima	58
Tabel 4. Distribusi Presentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 Menurut Lapangan Usaha	62
Tabel 5. Luas Wilayah Kecamatan Rasanae Barat	66
Tabel 6. Eksisting Penggunaan Lahan di Obek Wisata Pantai Lawata	69
Tabel 7. Kondisi Ketersediaan Sarana Wisata di Objek Wisata Pantai Lawata Tahun 2017	70
Tabel 8. Visualisasi Ketersediaan Prasarana dan Sarana di Objek Wisata Pantai Lawata	71
Tabel 9. Luas Wilayah Kecamatan Rasanae Barat di Bagi per Kelurahan	86
Tabel 10. Luas Wilayah Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Rasanae Barat	87
Tabel 11. Tingkat Pendapatan Masyarakat yang bekerja di Pariwisata Pantai Lawata	91
Tabel 12. Daftar Nama-nama Hotel dan Losmen di Kota Bima	94
Tabel 13. Data Kunjungan Wisatawan berdasarkan Kunjungan Hotel di Kota Bima	94

Tabel 14. Peranan Lapangan Usaha Terhadap PBRD Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2011-2015	97
Tabel 15. Jasa Travel dan Biro Perjalanan di Kota Bima	100
Tabel 16. Daftar Pasar di Kota Bima	103
Tabel 17. Daftar Toko Modern di Kota Bima.....	103
Tabel 18. Fasilitas Bank di Kota Bima	105
Tabel 19. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bima atas dasar harga Berlaku menurut lapangan usaha sektor jasa dan industri (juta rupiah), 2011-2015	111
Tabel 20. PRBD Perkapita 2012-2015.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Jalan Menuju Pantai Lawata.....	84
Gambar 2. Pedangan Asongan di Pantai Lawata	89
Gambar 3. Penyedia Wahana Penunjang Pariwisata.....	90
Gambar 4. Informasi dan Promosi Pariwisata.....	101
Gambar 5. Industri Tenun Khas Kota Bima	107
Gambar 6. Pandai Besi di Kota Bima	109
Gambar 7. Jajanan Khas Kota Bima (Pangaha Bunga)	110



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.Perbandingan Luas Wilayah Kota Bima Dirinci Per Kecamatan Tahun 2016.....	55
Diagram 2.Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan Rasanae Barat Dirinci Per Kelurahan Tahun 2016.....	66
Diagram 3.Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2011-2015 (Persen).....	98



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima 2011-2015 (Persen).....	64
--	----



Daftar Peta

Peta Administrasi Kota Bima.....	56
Peta Administrasi Kecamatan Rasanae Barat	67



ABSTRAK

Nama Penulis : Rizkun Imaduddin
NIM : 60800112041
Judul Penelitian : Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan wisata pantai lawata dalam mendukung pengembangan wilayah di Kota Bima. Penelitian dilakukan di Pantai Lawata karena pada saat ini Pantai Lawata menjadi salah satu objek wisata yang menjadi fokus pemerintah Kota Bima untuk dikembangkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis deskriptif Kualitatif : analisis yang memaparkan data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Analisis Multipler Effect (Dampak Berganda) adalah instrument yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Kegiatan wisata tersebut. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan wisata tersebut merupakan dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak induced. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikembangkannya wisata pantai lawata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang berada disekitar pantai lawata tersebut hal ini ditandai dengan naiknya pendapatan perkapita masyarakat tersebut yaitu diatas UMR Kota Bima sebesar Rp. 800.000. Selain itu didapatkan nilai multiplier effect untuk Ratio Income Multiplier Effect di kawasan pantai Lawata yaitu sebesar 18,22 yang artinya peningkatan sebesar 100.000 rupiah pengeluaran wisatawan akan mengakibatkan peningkatan masyarakat 1.822.000 rupiah pada total pendapatan masyarakat yang meliputi dampak langsung, dampak tidak langsung dan dampak induksi.

Kata Kunci : Pariwisata, Pantai Lawata, Multiplier Effect

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara disektor non migas. Adanya krisis ekonomi, sektor pariwisata diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang paling cepat, dikarenakan infrastruktur kepariwisataan tidaklah mengalami kerusakan, hanya saja faktor keamanan yang menyebabkan wisatawan mancanegara mengurungkan kepergiannya ke Indonesia. Hal ini dapat memberikan harapan bahwa pariwisata dapat langsung aktif bilamana wisatawan terutama wisatawan nusantara dapat diaktifkan lagi. Walaupun penghasilan seringkali lebih dikaitkan dengan jumlah wisatawan mancanegara, karena menghasilkan devisa, namun wisatawan nusantara sangat mempengaruhi kegiatan kepariwisataan, termasuk hotel, restoran maupun industri cinderamata. Selain menghasilkan pendapatan bagi negara, pengembangan obyek wisata juga untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan berlangsungnya sistem desentralisasi, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berlangsung sejak 1 Januari 2001 yang

dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat harus memberikan pembagian kekuasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya sehingga ada tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif yang nantinya akan menjadi sumber daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Hakekat otonomi daerah adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan melaksanakan sendiri apa yang menjadi bagian atau kewenangannya, oleh sebab itu otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Dengan begitu maka daerah berkewajiban untuk mengelola potensi daerah dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

Secara spesifik misi utama dari penerapan otonomi daerah adalah keinginan untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah, untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahan maka pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber keuangan yang cukup memadai.

Sebagai sebuah kota yang baru terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bima awalnya merupakan kota administratif. Terbentuk pada tanggal 10 April 2002

melalui Undang-undang tentang Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002 , Kota Bima juga merupakan salah satu daerah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya sendiri.

Konsekuensi yang besar ditanggung pemerintah Kota Bima dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, fungsi pemerintahan itu antara lain fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pelaksanaan pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*protective function*). Untuk melaksanakan ketiga fungsi pemerintahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, dalam situasi ini daerah pasti berusaha menggali dan memajukan potensi yang ada dalam daerahnya guna memakmurkan daerah dan masyarakat setempat mengingat saat ini sudah menjadi otoritas daerah itu untuk mengatur dan membangun daerahnya.

Pemerintah Daerah Kota Bima dihadapkan dengan dua masalah sekaligus, yang pertama adalah kenyataan bahwa pembiayaan untuk menjalankan pemerintahan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sangat besar, di sisi lain daerah tersebut merupakan daerah yang minim sumber daya alam. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Bima harus dapat mengembangkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bima.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut banyak usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan yang mampu

memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warga masyarakat di Kota Bima. Salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah adalah sektor pariwisata dimana salah satunya adalah obyek wisata alam. Dari banyaknya wisata alam di Bima, ada beberapa obyek daya tarik wisata yang cukup dikenal dan diperkenalkan sebagai obyek daya tarik wisata alam Kota Bima salah satunya adalah Pantai Lawata.

Dalam islam telah dijelaskan agar manusia memanfaatkan potensi alam dengan baik sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 32-33 :

لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرِ
رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَبَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَبَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ
() وَبَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ
وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ()

Terjemahan :

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. 33. Dan Dia telah menundukkan (pula) matahari dan bulan bagimu yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan malam dan siang bagimu” (Departemen Agama, 2006).

Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya masing-masing, dan menurunkan air yang deras dari awan, untuk mengeluarkan rezeki kalian

berupa buah-buahan dari tanaman di kebun dan pepohonan. Hanya Dia juga yang, dengan kehendak-Nya, menundukkan perahu untuk kalian, hingga melaju di lautan, mengangkut harta dan barang dagangan kalian. Hanya Dia yang menundukkan sungai- sungai berair tawar, agar kalian memanfaatkannya untuk minum dan mengairi tanaman.

(Dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar) di dalam garis edarnya secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti (dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian malam) supaya kalian tenang di dalamnya (dan siang) dan supaya kalian mencari kemurahan Allah di dalamnya. (Tafsir Al-Misbah).

Pantai Lawata merupakan salah satu kawasan wisata alam pantai yang terdapat di Kota Bima dan sudah sejak tahun 1961 Pantai Lawata menjadi sebuah obyek wisata atau tempat piknik bagi masyarakat Bima. Pantai Lawata terletak di Kelurahan Sambinae dengan jarak 5 km dari pusat Pemerintahan kota Bima. Di Pantai Lawata terdapat bukit-bukit kecil yang memiliki dua buah gua kecil, dengan panorama alam yang indah serta pantainya sangat jernih sebagai tempat yang bagus untuk olahraga air atau sebagai tempat permandian air laut.

Pantai Lawata ibarat sebuah gerbang selamat datang, memberi isyarat bahwa perjalanan akan segera memasuki Kota Bima. Panjang pantai kira-kira setengah kilometer yang dikelilingi perbukitan yang indah. Di bawah bukit berbatu terdapat

sebuah goa peninggalan Jepang. Dahulu tempat ini merupakan tempat peristirahatan bagi para bangsawan Bima dan kemudian menjadi tempat rekreasi andalan masyarakat yang selalu ramai dikunjungi.

Pemerintah Kota Bima terus membenahi Pantai Lawata untuk menjadi salah satu obyek wisata pantai andalan di kota Bima dengan membangun berbagai sarana dan prasarana wisata seperti rumah makan terapung, perlengkapan berenang, panggung hiburan rakyat serta sederetan penataan lainnya. Sarana pariwisata Lawata Beach Hotel Restaurant and Swimming Pool telah dibangun sejak dulu. Tempat ini dulu menjadi hotel yang selalu ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pantai Lawata adalah pantai yang dikelola oleh pemerintah Kota Bima dan bekerjasama dengan pihak ketiga. Namun setelah kontrak kerja sama pemerintah Kota Bima dan pihak ketiga diputuskan sekarang keberadaan sarana dan prasarana pariwisata tersebut sangat memprihatinkan karena sudah ditinggalkan oleh pengelolanya. Bangunan yang rusak dan tidak terawat tersebut memberikan kesan kumuh bagi Pantai Lawata yang sangat indah.

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, Pantai Lawata kini sudah dibuatkan master plan dan sudah ada investor baru yang akan membangun berbagai sarana pariwisata di sana. Bangunan bekas hotel akan dipugar menjadi tempat rekreasi yang menarik dan nyaman bagi pengunjung.

Fasilitas pariwisata yang ada di Pantai Lawata berupa shelter dan panggung hiburan yang akan menampilkan berbagai macam hiburan dan kesenian rakyat. Di areal sekitar Pantai Lawata, di atas bukit yang menghadap ke arah pantai juga telah dibangun rumah makan dan tempat lesehan yang menyajikan berbagai makanan daerah Bima. Pemandangan Pantai Lawata menarik untuk dikembangkan. Pantai yang asri dengan airnya yang tenang sangat cocok untuk olah raga air. Panorama keindahan Teluk Bima yang tenang terlihat jelas jika berdiri di atas bukit Pantai Lawata. Memandang ke arah barat daya terlihat Pulau Kambing dan Pelabuhan Bima. Di sebelah utara, hamparan pohon kelapa dari perkebunan penduduk, bukit yang menjulang, dan keindahan taman kota Ama Hami menambah daya tarik Pantai Lawata. Tempat ini sangat ideal untuk dikembangkan wisata bahari karena air lautnya tenang. Jenis atraksi yang bisa dikembangkan antara lain memancing, menyelam, berperahu, berselancar, dan berlayar menuju Pulau Kambing, Desa Kolo, dan Wadu Pa,a (batu pahat yang menjadi situs peninggalan pemujaan agama Budha di Desa Sowa Kabupaten Bima).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran objek wisata pantai Lawata dalam mendukung sektor kepariwisataan di Kota Bima

2. Bagaimana pengaruh pengembangan wisata pantai Lawata dalam pengembangan wilayah di Kota Bima

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran objek wisata pantai Lawata dalam mendukung sektor kepariwisataan di Kota Bima
2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan wisata pantai Lawata dalam pengembangan wilayah di Kota Bima

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan dan penyelesaian berbagai masalah kepariwisataan.
2. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang pengembangan wisata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah yang berkaitan dengan dampak pengembangan wisata pantai lawata terhadap pengembangan wilayah di Kota Bima. Adapun lingkup variabel yang akan diteliti yakni lapangan pekerjaan, sarana prasarana, Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, antara lain :

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan

BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan mengenai pariwisata dan pengembangan wilayah, dampak yang ditimbulkan pariwisata, peran pariwisata dalam pembangunan, upaya memaksimalkan peran pariwisata dalam pembangunan, dan strategi pengembangan pariwisata

BAB III Metode Penelitian, menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data yang digunakan, definisi operasional, dan kerangka pembahasan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, secara umum dikemukakan mengenai gambaran dari letak dan tempat penelitian, serta hasil temuan dan pembahasan yang disajikan dalam tabel frekuensi dan persentase serta melakukan pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis.

BAB V Penutup, yakni menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan kemudian menyampaikan saran atas hasil temuan di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pariwisata dalam Pengembangan Wilayah

Dalam era otonomi daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan maka diperlukan suatu model pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas serta karakteristik wilayah masing – masing, sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi daerah sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan. Menurut Tantra (2014) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan diperlukan sebuah kerangka teoritik, yaitu paradigma berpikir yang memperhatikan ruang secara realistik. Ruang tidak berarti fisik, tetapi juga lingkungan sosial budaya dalam arti luas. Pola dasar pembangunan yang memperhatikan ruang (fisik dan non fisik) secara holistik yaitu ruang sebagai kesatuan wilayah administratif, ekonomi, historis dan empiris. Dengan demikian pola pembangunan dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi lingkungan dan manusianya.

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Pendekatan pengembangan pariwisata dengan mendasarkan pada pandangan keruangan, maka pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan diantaranya dengan beberapa teori pengembangan wilayah seperti dengan teori kutub pertumbuhan atau

dengan konsep tempat sentral (Christaller). Teori kutub pertumbuhan dari Christaller dapat dioperasikan atas dasar tiga konsep dasar yakni (1) konsep *leading industry*, (2) konsep *polarization*, (3) konsep *spread effects* (Sujali, 1989). Konsep *leading industry* mendasarkan pemikiran bahwa obyek wisata yang dijadikan sebagai *leading industry* adalah obyek wisata yang mempunyai potensi tinggi sehingga dengan potensi yang dimiliki dapat mempengaruhi perkembangan obyek-obyek wisata kecil di sekitarnya.

Konsep polarisasi mendasarkan pemikiran, bahwa suatu obyek wisata dapat berkembang kalau masing-masing obyek wisata dapat berkembang kalau masing-masing obyek wisata tersebut mempunyai identitas yang khas. Artinya perlu adanya diversifikasi produk-produk wisata.

Konsep *spread effects* didasarkan pada pemikiran, bahwa obyek wisata yang potensial perlu dilengkapi sarana-prasarana agar dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah tempat obyek wisata.

Pengembangan destinasi wisata dalam kerangka pembangunan daerah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam tataran makro, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tataran mikro. Sehingga pengembangan pariwisata daerah haruslah juga memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang baik dapat mendorong terbukanya peluang kerja, pengembangan produk

lokal,serta kesempatan pendidikan dan pelatihan masyarakat. Secara harafiah pengembangan diartikan sebagai proses atau cara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2005: 538) mendefinisikan pengembangan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik, maju sempurna dan berguna,sehingga pengembangan merupakan suatu proses / aktivitas memajukan sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi menarik dan lebih berkembang.

Pariwisata dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, karena dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Kedatangan wisatawan mancanegara (*foreign tourists*) pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat, di mana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008).

Menurut Yoeti (2008), dilihat dari kacamata ekonomi makro, jelas pariwisata memberikan dampak positif, karena sebagai suatu industri :

1. Dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datangnya wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (*need*), keinginan (*want*) dan harapan (*expectation*) wisatawan yang terdiri berbagai kebangsaan dan tingkah lakunya.
2. Dapat meningkatkan kesempatan kerja (*employments*). Bayangkan saja, bila sebuah hotel dibangun dengan kamar sebanyak 400 kamar, paling sedikit diperlukan karyawan 600 orang dengan ratio 1: 1,5.

3. Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat *multiplier effect* yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar itu.
4. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Seperti kita ketahui tiap wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10 persen sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Bruto (GDB)*.
6. Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.

Menurut Suwanto (2002) pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Dengan demikian pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengembangkan destinasi, kawasan serta usaha pariwisata menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi masyarakat.

Grady dalam Suwanto (2002) menjelaskan bahwa kriteria pengembangan pariwisata haruslah selalu melibatkan masyarakat lokal sehingga pengembangan yang dilakukan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pengembangan juga harus diarahkan agar tidak merusak nilai – nilai dalam masyarakat, serta minimalisasi dampak melalui penyesuaian program dengan kapasitas sosial masyarakat. Kriteria tersebut sejalan dengan konsep dasar pariwisata berbasis masyarakat

(*communitybased tourism*) serta pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourismdevelopment*). Hal yang sama juga tertuang dalam kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan. Dalam Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 disebutkan bahwa prinsip dasar pengembangan pariwisata agar berkelanjutan yaitu: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta melestarikan alam lingkungan dan budaya.

Menurut Spillane (1989), dampak pariwisata terhadap suatu wilayah adalah cukup kompleks. Untuk itu pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga semua segi pengembangan pariwisata memperhitungkan pula untung rugi apabila dibanding dengan pembangunan sektor lain. Keuntungan yang diharapkan biasanya adalah membuka kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, menambah devisa negara, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia dan menunjang gerak pembangunan daerah. Sedangkan kerugian antara lain lingkungan menjadi rusak, pariwisata beralih ke tangan asing, pencarian benda-benda kuno, berubahnya tujuan kesenian rakyat dan upacara adat tradisional, timbulnya industri seks, dan lain-lain.

2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial suatu Negara.
3. Pengembangan pariwisata dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat. Dari berbagai penjelasan, maka dapat dilihat hubungan dalam memberikan konsep secara operasional tentang pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang dimaksud dalam pengembangan wisata pantai di Kota Bima merupakan sebuah proses untuk mengarahkan kegiatan pariwisata menjadi lebih baik, dengan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi sumber daya yang terkait di dalamnya.
4. Pengembangan pariwisata harus sadar “lingkungan”. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan yang telah ada.
5. Pengembangan pariwisata dapat mengarahkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
6. Penentuan tata cara pelaksanaan harus disusun se jelas-jelasnya dengan pencatatan (monitoring) terus menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan kehidupan masyarakat.

Menurut Mill dalam bukunya yang berjudul “The Tourism, International Business” (2000, p.168-169), menyatakan bahwa : “pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut”.

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cinderamata yang memiliki ke khasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

Perlu dikemukakan juga bahwa dalam melihat dampak sosial budaya pariwisata terhadap masyarakat setempat, masyarakat tidak dapat dipandang sebagai suatu yang *internally totally integrated entity*, melainkan harus juga dilihat segmen-segmen yang ada, atau melihat berbagai *interest groups*, karena dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama bahkan bisa bertolak belakang dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit digeneralisasi untuk suatu masyarakat, karena penilaian positif atau negatif tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung

„nilai“ (*value judgement*), sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negatif masih perlu dipertanyakan, “positif untuk siapa dan negatif untuk siapa?” (Pitana, 1999).

B. Pariwisata dan Dampak yang Ditimbulkannya

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap masyarakat lokal. Di lain pihak, dampak pariwisata terhadap wisatawan dan/atau negara asal wisatawan belum banyak mendapatkan perhatian. (Suartha, N., 1994: 87)

Menurut (Cohen, Erik, 1994: 112) Meskipun pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara politik, keamanan, dan sebagainya, dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah:

1. Dampak positif obyek wisata terhadap Sosial Ekonomi

Secara formal, para ahli membedakan dampak sosial ekonomi yang terjadi karena kegiatan pariwisata, terdiri dari Efek Langsung (*Direct Effects*), Efek Tidak Langsung (*Indirect Effects*) dan Efek Induksi (*Induced Effects*). Sementara itu, Efek Tidak Langsung dan Efek Induksi kadang-kadang disebutnya sebagai Efek Sekunder

(*Secondary Effects*) yang menyertai Efek Langsung selaku Efek Primer (*Primary Effect*).

Analisis dampak sosial ekonomi kegiatan pariwisata lazimnya berfokus pada perubahan penjualan, penghasilan dan penempatan tenaga kerja di daerah bersangkutan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata. Secara nyata, kegiatan pariwisata memberikan manfaat pada penjualan, keuntungan, lapangan kerja, pendapatan pajak dan penghasilan dalam suatu daerah.

- a. Peningkatan pendapatan negara dalam valuta asing atau devisa, sehingga akan bisa memperkuat neraca pembayaran. Bahwa pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran merupakan perbandingan antara semua mata anggaran yang diterima oleh negara dari negara-negara asing sebagai pemasukan dan semua anggaran yang harus dibayar kepada negara-negara asing sebagai pengeluaran. Karena wisatawan itu membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya, maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan. Inilah artinya, kalau dikatakan bahwa pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran. (Nyoman Pendit S, 1994: 65). Akan tetapi penerimaan dari pariwisata menambah besarnya volume uang didalam masyarakat, dan ini dapat menimbulkan inflasi kalau produksi komoditi didalam negeri tidak bertambah. Inilah sebabnya maka dikawasan pariwisata harga-harga biasanya lebih mahal dari pada di daerah-

daerah. Banyaknya barang tidak dapat mengimbangi laju pertambahan uang yang beredar.

- b. Penambahan pendapatan negara dari penerimaan pajak. Banyaknya wisatawan yang berkunjung tentunya banyak juga wisatawan yang membelanjakan uangnya untuk membeli barang yang ada di daerah sekitar. Dengan demikian secara tidak langsung pemerintah mendapat pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh para pedagang yang barangnya laku terjual. Semakin banyak wisatawan berkunjung maka semakin banyak pula yang membeli barang, maka pajak yang diterima oleh Negara juga semakin banyak. Pajak yang telah dibayarkan oleh pedagang kemudian akan dikelola untuk dapat digunakan dalam pembangunan daerah seperti pengembangan objek daerah wisata dan lain sebagainya.
- c. Menimbulkan adanya dampak penggandaan (*multiplier effect*). Bahwa sejumlah uang yang diterima masyarakat akan dikeluarkan lagi, yang menerima belakangan ini akan mengeluarkan lagi dan seterusnya Akibatnya di dalam sosial ekonomi masyarakat akan terjadi pertambahan uang berganda. Inilah yang dimaksud dengan dampak penggandaan (*multiplier effect*) Dikarenakan adanya “kebocoran-kebocoran” yaitu sebagian dari uang tidak ikut beredar di dalam masyarakat karena ditabung atau karena dibelanjakan untuk barang atau jasa import, sehingga bagian uang tersebut mengalir ke masyarakat luar negeri. Jadi peredaran uang itu

berjalan terus tetapi tidak tanpa batas, karena pada suatu saat dampak pergandaan itu begitu kecil sehingga praktis nihil.

- d. Terbentuknya kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kesempatan berusaha yang langsung untuk menerima kebutuhan wisatawan meliputi usaha akomodasi, restoran, biro perjalanan, pusat perbelanjaan. Sedangkan lapangan usaha yang tidak langsung seperti : kerajinan, industri pakaian, industri olahraga dan lapangan usaha yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Luasnya kesempatan dalam berusaha berarti akan membuka lapangan kerja karena sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yaitu kegiatannya membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak. Kecuali itu pariwisata juga memerlukan tenaga kerja untuk keperluan pemberian jasa perorangan, seperti pramuwisata, instruktur, misalnya untuk main sky, pramuria di club malam, pelayan di bar, pengangkut barang, sopir dan sebagainya. Ini semua membuat tenaga kerja yang diperlukan di bidang pariwisata menurut perbandingan lebih banyak dari pada di usaha-usaha lain. Banyak tenaga kerja di bidang pariwisata itu memerlukan pendidikan dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan.
- e. Mendorong pembangunan daerah. Daerah industri bukan daerah yang biasanya berkembang menjadi kawasan pariwisata. Daerah-daerah di mana terdapat atraksi wisata ialah daerah-daerah terpencil dengan penduduk dan kebudayaan terasing, pantai laut tanpa penduduk, atau dengan kegiatan

penangkapan ikan sekadarnya, pegunungan dengan pemandangan dan hawa yang sejuk dan sebagainya. Semuanya daerah di mana boleh dikatakan tidak terjadi pembangunan. Karena di daerah itu terdapat atraksi wisata, maka daerah-daerah tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kalau hal ini terjadi pada perkembangan kepariwisataan di daerah, maka akan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan dan membangun sarana dan prasarana yang diperlukan seperti:

- 1) Pembangunan dan perbaikan jalan
- 2) Instalasi listrik
- 3) Pembenahan obyek dan daya tarik wisata
- 4) Perbaikan lingkungan.

Selain itu juga akan mendorong para infestor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan obyek dan daya tarik wisata. Usaha sarana akomodasi, usaha jasa biro perjalanan, restaurant dan rumah makan.

Menurut Cohen (1984) Dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja
- 4) Dampak terhadap harga-harga
- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan

- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan control
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

2. Di samping pengembangan pariwisata mempunyai manfaat yang positif bagi pembangunan juga mempunyai berbagai macam dampak negatif, antara lain :

- 1) Mahalnya harga barang atau jasa pelayanan
- 2) Tumbuhnya sikap mental materialisme
- 3) Dampak positif obyek wisata terhadap sosial budaya

C. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata

Dalam meningkatkan kegiatan kepariwisataan, pemerintah telah mencanangkan tahun sadar wisata nasional sehingga masyarakat diharapkan dapat menyambut dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Kepariwisataan masih merupakan suatu hal yang baru sehingga masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan dalam upaya menunjang kegiatan pariwisata.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata yang sifatnya mendorong dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Motivasi pokok para wisatawan

Adapun motivasi pokok wisatawan datang mengunjungi suatu daerah wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan dan permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri khas tertentu yang menarik

wisatwan seperti : keindahan alam, iklim atau cuaca, kebudayaan sejarah, kesukuan, kemudahan dalam hal perjalanan ke tempat tertentu.

2. Situasi dan kondisi negara atau daerah tujuan wisata

Faktor situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik, ekonomi, serta keamanan negara atau daerah tujuan wisata juga sangat diperhatikan oleh wisatawan yang ingin melakukan kunjungan wisata ke suatu daerah . mereka berharap akan merasa aman, santai, dan senang saat berwisata di tempat tersebut. Oleh karena itu negara atau daerah yang bersangkutan harus memperhatikan hal ini agar permintaan pariwisata semakin bertambah.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan nyata dan gaya hidup akan mempengaruhi permintaan pariwisata. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan dan gaya hidup, maka semakin besar permintaan akan rekreasi dan manfaat lain dari pariwisata.

4. Harga

Harga yang termasuk di sini adalah ongkos transportasi, sewa kamar hotel, harga barang untuk oleh-oleh (*souvenir*), dan lain sebagainya. Faktor ini juga perlu diperhatikan, karena pengunjung (wisatawan) pada umumnya bukan merupakan orang-orang kaya akan tetapi tergolong sebagai orang-orang yang berpenghasilan sedang. Dimana pada umumnya mereka ingin segala sesuatunya terasa lebih baik dan dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan permintaan

pariwisata, maka hendaknya harga-harga yang ditetapkan tidak sampai melebihi (lebih mahal dari) negara atau daerah lain.

5. Keramah-tamahan Penduduk

Masyarakat Indonesia dikenal dengan kermah-tamahannya yang perlu terus dipertahankan karena hal ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi ketenangan dan betahnya wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata.

6. Kegiatan Pemasaran Kepariwisata (Promosi Wisata)

Untuk meningkatkan kepariwisataan perlu dilakukan kegiatan pemasaran kepariwisataan. Bids berbentuk brosur perjalanan wisata, *postcard* dan bentuk-bentuk lain yang di edarkan di dalam dan di luar negeri. Selain itu juga hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang biro-biro luar negeri dengan maksud memperkenalkan daerah wisata.

7. Misi – misi Kebudayaan

Negara kita yang kaya akan aneka kebudayaan tardisional, perlu diperkenalkan pada masyarakat Internasional salah satunya dengan cara mengirim misi-misi kebudayaan ke luar negeri. Juga untuk memperkenalkan lokasi atau daerah-daerah objek wisata, dalam hal ini duta-duta besar perlu lebih giat dalam berperan untuk mengiatkan misi-misi kebudayaan.

8. Masalah Fasilitas

Masalah fasilitas memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata, karena betapapun bagus nya daerah tujuan pariwisata tersebut dan

bagaimanapun efisien dan gencarnya promosi wisata yang dilakukan, namun wisatawan pasti akan sangat kecewa bila tidak menemukan fasilitas seperti yang mereka inginkan. Kekecewaan ini dapat berakibat panjang karena wisatawan tersebut akan menceritakannya kepada calon wisatawan yang lain yang merupakan rekan sekota atau senegaranya, hal ini bisa saja berantai dan berakibat luas. Oleh karena itu, baik dari segi fasilitas kepariwisataan yaitu terdiri dari berbagai jasa-jasa yang memberi kemudahan untuk menikmati daerah tujuan wisata, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, urusan keimigrasian dan bea cukai harus menyediakan pelayanan yang sebaik mungkin, karena kesan pertama sangat berpengaruh bagi wisatawan untuk perjalanan selanjutnya.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, masih ada beberapa hal pengembangan dan pembangunan yang menunjang sektor pariwisata yaitu :

- a. Pemeliharaan objek-objek wisata yang sudah ada
- b. Pembangunan jalan-jalan atau transportasi lainnya untuk lebih mudah dalam mencapai lokasi objek
- c. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan pada daerah obek wisata
- d. Menjaga mutu kesenian daerah agar benar-benar tetap orisinil sehingga dapat merangsang para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

Dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan agar perkembangan pariwisata di Indonesia akan dapat memenuhi sasaran, sehingga peranan pariwisata

nantinya benar-benar dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, sekaligus juga dapat menambah pendapatan masyarakat.

D. Peran Pariwisata dalam Pembangunan

1. Perekonomian

Menurut Spilane (1987:21), dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Menurut Boediono (1981:9) bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, yang menekankan pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu „proses“ mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada saat tertentu, melainkan dilihat dari aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Dalam kaitannya dengan „output per kapita“, pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Dengan demikian untuk menganalisis suatu pertumbuhan ekonomi, teori yang digunakan harus mampu menjelaskan GDP total dan jumlah penduduk. Aspek „jangka panjang“ dalam suatu pertumbuhan ekonomi, juga perlu dilihat untuk memperhitungkan apakah ada kenaikan output per kapita dalam jangka waktu atau

tidak. Jika terjadi kenaikan, maka terjadi pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya.

Jadi dari dua teori diatas hubungan antara Ekonomi Kepariwisata dengan Ekonomi masyarakat bila suatu daerah di bangun tempat-tempat wisata maka secara tidak langsung penduduk sekitar akan mengalami dampak pertumbuhan ekonomi, karena tempat-tempat wisata tersebut akan menarik lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata tersebut.

Pariwisata berperan dapat membawa dampak pada kehidupan masyarakat, hal ini dapat diketahui dengan lima, yaitu :

- a. Pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan perbandingan antara semua mata anggaran yang diterima oleh negara dari negara-negara asing sebagai pemasukan dan semua anggaran yang harus dibayar kepada negara-negara asing sebagai pengeluaran. (yoeti, 1996:22)
- b. Pariwisata menyebabkan pembangunan daerah non industri. Daerah-daerah dimana terjadi atraksi wisata ialah daerah terpencil, boleh dikatakan pembangunan didaerah tersebut belum maksimal. Hal itu dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata dan terjadilah pembangunan, seperti dibangunnya hotel, tempat makan, toko-toko, dan sebagainya
- c. Pariwisata menciptakan lapangan kerja. Industri pariwisata dengan produknya adalah merupakan usaha yang padat karya. Seperti hotel yang membutuhkan tenaga kerja dalam pengoprasiaannya. Wisatawan memerlukan makan dan minum,

secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja pada sektor pertanian. Banyak tenaga kerja di sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan, dan seterusnya.

- d. Dampak pergandaan. Uang baru yang masuk ke dalam suatu perekonomian dalam bentuk apapun, investasi, pemberian, atau pembelanjaan pemerintah, kiriman uang dari pekerja di luar negeri, atau pengeluaran wisatawan mendorong perekonomian, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, karena ia dibelanjakan kembali.

Faktor-faktor pendorong pengembangan pariwisata di Indonesia menurut Spilane (1987:57), adalah : 1) berkurangnya peranan minyak bumi sebagai sumber devisa negara jika dibanding dengan waktu lalu; 2) merosotnya nilai ekspor pada sektor nonmigas; 3) adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten; 4) besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata.

2. pembangunan Infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik

wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah. Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata “*attractions*” khususnya daya tarik wisata *man-made*, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengemasan.

Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “*acesable*” akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “*Amenities*” seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan. Pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

Kegiatan pariwisata yang berkembang menuntut untuk dapat menyediakan infrastruktur penunjang yang memadai. Menurut Heraty dalam *Tourism Planning*, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha pengembangan pariwisata. Seperti yang telah dikemukakan oleh Gunn dalam konsep destinasi, salah satu aspek yang sangat penting untuk mendukung suatu tujuan wisata adalah ketersediaan sarana prasarana. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata dalam konteks pengembangan Indonesia mengacu

juga pada pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Dalam konteks pariwisata, sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan selama berada di tempat tujuannya. Pengertian infrastruktur dalam konteks pariwisata adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa suatu sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. Ashworth (1992) menyebutkan bahwa salah satu aspek utama yang dapat mendukung perkembangan pariwisata adalah ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata. Secara umum, berdasarkan Page (1995) dalam *Urban Tourism*, fasilitas utama penunjang kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi :

- a) Sarana Akomodasi
- b) Penyedia jasa makanan
- c) Sarana perbelanjaan
- d) Berbagai sarana pendukung lainnya

Namun dalam penyediaannya di lapangan, hal tersebut masih menjadi salah satu permasalahan dalam kepariwisataan di Indonesia karena dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara *supply* dan *demand*. Dalam hubungannya dengan infrastruktur, berkembangnya kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang dimaksud diantaranya berupa munculnya atau dibangunnya berbagai infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, namun juga dapat memberikan beban yang

berlebih bagi infrastruktur perkotaan yang telah tersedia. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang baik dirasa masih sangat diperlukan.

Apabila dikaitkan kembali dengan sistem pariwisata, terdapat hubungan antara permintaan dan penawaran. Motivasi merupakan faktor pendorong untuk mengadakan perjalanan dan kemudian menimbulkan permintaan mengenai prasarana, sarana perjalanan dan perhubungan, sarana akomodasi dan penyediaan jasa. Menurut Spillane, industri pariwisata tidak hanya membutuhkan berbagai sarana akomodasi seperti hotel dan penginapan, restoran, agen perjalanan wisata, perencana perjalanan wisata, industri kerajinan, namun industri pariwisata juga memerlukan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Selain itu juga, diperlukan prasarana lain yang lebih bersifat *public utilities* seperti sarana kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Melihat keterkaitan antara pengembangan pariwisata dengan ketersediaan infrastruktur, maka kegiatan pariwisata juga memberikan dampak bagi infrastruktur. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pariwisata, salah satu infrastruktur yang paling terkait dan mempengaruhi pariwisata adalah infrastruktur transportasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Inskeep dalam *Tourism Planning*, salah satu infrastruktur dasar yang dianggap penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan dan pengembangan pariwisata adalah penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya berupa jalan raya, tetapi berbagai

sarana prasarana lainnya yang masih terkait dengan transportasi seperti fasilitas parkir, moda transportasi serta berbagai sarana prasarana lainnya. Sebuah kota harus memiliki akses ke dalam sebuah sistem fasilitas infrastruktur dan jasa dalam usaha mendukung kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Wilayah perkotaan dapat memiliki banyak fasilitas publik maupun fasilitas kuasi publik menyediakan berbagai fasilitas kepada masyarakat, seperti transportasi, air, persapahan, rekreasi, pendidikan serta kesehatan dan keamanan. Dalam hal ini, insfrastruktur perkotaan yang paling berkaitan dengan kegiatan pariwisata adalah insfrastruktur transportasi, selain infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata lainnya. Untuk insfrastruktur transportasi, masyarakat bisa mendapatkan trotoar, jalur pejalan kaki dan sepeda, lahan parkir, jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri, jalan tol, garasi, kendaraan dan lapangan terbang.

3. Regulasi

Karakteristik pembangunan pariwisata bersifat multisektoral dan multi dimensi sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah tujuan wisata dituntut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pariwisata; Asosiasi Profesi Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat; Perguruan Tinggi; Masyarakat; Investor/Developer; Pers dan Media massa. Dengan karakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan perangkat yang secara langsung dapat

menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan di daerah dapat terjaga.

Selama ini, Pemerintah membina lahirnya *Destination Management Organization (DMO)* yang tugasnya adalah melaksanakan perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata. Menghadapi berbagai perjanjian perdagangan bebas, kompleksitas pembangunan pariwisata di daerah akan meningkat.

Untuk itu, perlu melakukan reposisi dan revitalisasi DMO yang saat ini sudah terbangun. Pilihan reposisi dan revitalisasi DMO adalah:

- a. DMO tetap sebagai organisasi swasta namun kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme pembiayaan DMO perlu dirumuskan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, LPKP, BPKP dan BPK. Tujuannya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program paling tidak selama lima tahun, dan tidak terganggu oleh aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. DMO menjadi bagian dari SPKD Provinsi untuk urusan Kepariwisata tetapi dikhususkan menjalankan fungsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Dengan demikian, unit kerja DMO menjadi permanen dan tidak terganggu lagi dengan proses pengadaan.

- c. DMO ditransformasi menjadi unit kerja Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan tugas dalam satu regional yang terdiri dari beberapa provinsi.

E. Upaya Memaksimalkan Peran Pariwisata Dalam Pembangunan

Menurut Suwantoro (2004), Upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari kebijaksanaan dalam pengembangan wisata alam, dari segi ekonomi pariwisata alam akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Memang pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarannya. Untuk itu diperlukan evaluasi pendapat yang yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dari pendapatan pariwisata dari pengunjung sebagai mekanisme pengembalian biaya pengelolaan dan pelestarian kegiatan pariwisata alam belum tercapai secara optimal.

Situasi dan kondisi sosio-ekonomi Indonesia saat ini, yang memperlihatkan bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan lainnya serta semakin rusaknya lingkungan akibat kegiatan manufaktur dan kegiatan-kegiatan

ekonomi lainnya yang mengeksploitasi sumberdaya alam, maka pariwisata perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber produksi andalan. Sektor pariwisata selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti karena pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran atau obyek wisata.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan Dalam mendukung pengembangan pariwisata, kebijakan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penatan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah
3. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara interaktif terkaitdengan pengembangan sektor-sektor lainnya.

4. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stekholder.
- Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan

kegiatan produksi yang ekstraktif)² sampai dengan kegiatan hilir (kegiatan produksi jasa).

Agar suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik, disamping harus ada objek dan atraksi wisata, suatu daya tarik wisata harus mempunyai 3 syarat daya tarik yaitu:

- a. ada sesuatu yang bisa dilihat (something to see)
- b. ada sesuatu yang dapat dikerjakan (something to do)
- c. ada sesuatu yang bisa dibeli (something to buy)

Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Seorang wisatawan yang datang kesuatu daya tarik wisata dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (benefit) dan kepuasan (satisfactions). Manfaat dan kepuasan tersebut dapat diperoleh apabila suatu daya tarik wisata mempunyai daya tarik. daya tarik suatu daya tarik wisata dengan istilah attractive spontanee, yaitu segala sesuatu yang terdapat didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ketempat tersebut.

F. Strategi Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk memajukan kegiatan pariwisata sehingga tercipta suatu usaha kondisi pariwisata yang dapat menghasilkan devisa. Pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan pariwisata pantai, tidak hanya membenahi obyek wisata alam dan perairan atau hanya melakukan pengembangan akomodasi dan restoran, tetapi jauh lebih luas dari itu. Wisatawan

yang datang tetap memerlukan fasilitas, angkutan, atraksi wisata air yang menarik, pelayanan, cinderamata, suasana aman, dan lain-lain.

Ditinjau secara nasional, menurut Soekadijo (1996:10) tujuan pengembangan pariwisata diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor, antara lain :

1. Mengubah atau menciptakan usaha-usaha baru yang berkaitan dengan jasa - jasa wisata misalnya: usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lainlain) yang memerlukan perluasan beberapa industri kecil seperti industri kerajinan tangan.
2. Memperluas pasar barang-barang lokal.
3. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industri kerajinan tangan dan cinderamata serta tempat-tempat penjualan lainnya).
4. Mempercepat sirkulasi ekonomi dalam usaha negara kunjungan dengan demikian akan memperbesar *multiplier effect*.

Pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah pengunjung, kemudahan transportasi, ketersediaan fasilitas pendukung (seperti hotel, restoran, sarana hiburan), adanya promosi dan daya tarik dari atraksi wisata yang ada. Atraksi wisata dan fasilitas atau kenikmatan merupakan dasar utama dari pariwisata.

Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka wisatawan tidak akan mempunyai motivasi atau keinginan untuk mengunjungi obyek wisata tersebut (Robinson, 1976:38). Oleh karena itu agar pariwisata benar-benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan (*an economically sustainable area/ecosytem*), maka pariwisata harus di bangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang :

1. perlu ditetapkan berbagai paraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu perlu diambil tindakan yang tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan pawisata harus melibat masyarakat setempat. Hal ini penting karena pengalaman pada beberapa DTW, samasekali tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar. Contoh kasus: pengelolaan DTW di Pantai Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Pada DTW tersebut masyarakat tidak berkesempatan untuk terlibat, baik untuk menjual hasil-hasil pertanian, kerajinan maupun menjadi karyawan di tempat itu.
3. Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam, selain dengan mencanangkan cara kampanye dan program Visit Indonesian Year seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kegiatan promosi juga perlu dilakukan dengan pembentuk sistem

informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada negara-negara lain, terutama negara-negara yang potensial.

4. Perlu menentukan DTW-DTW utama yang memiliki keunikan dibanding dengan DTW lain, terutama yang bersifat tradisional dan alami. Kebetulan saat ini obyek wisata yang alami dan tradisional menjadi sasaran utama para wisatawan asing. Obyek ini masih banyak ditemukan di luar Jawa, misalnya di daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Papua dan lain-lain.
5. Pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan sistem yang jujur, terbuka dan adil. Kerjasama ini penting untuk lancarnya pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Selain itu kerjasama di antara penyelenggara juga perlu dibangun. Kerjasama di antara agen biro perjalanan, penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi dan komponen-komponen terkait lainnya merupakan hal sangat penting bagi keamanan kelancaran dan kesuksesan pariwisata.
6. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua DTW yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan perhatian yang sama kepada semua DTW. Perhatian terhadap DTW yang sudah mandiri hendaknya dikurangi dan memberikan perhatian yang lebih terhadap DTW yang memerlukan perhatian lebih.

7. Menggugah masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk lokal serta membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan.
8. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telephone, angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain disekitar lokasi DTW sangat diperlukan.

Dengan memperhatikan beberapa saran ini kiranya dapat membantu bagi penyelenggaraan pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Tentunya saran-saran tersebut tidak berlaku untuk semua DTW, hal itu sangat tergantung pada kebutuhan DTW masing-masing yang memiliki permasalahannya sendiri dari waktu ke waktu dan lingkungan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, maka dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Wilayah daratan dan lautan yang luas dengan

berbagai keragaman dan keunikannya merupakan potensi yang dapat diandalkan bagi kemajuan pariwisata.

Berbagai peluang tercipta terutama turunnya nilai mata uang rupiah dan kecenderungan para wisatawan asing untuk mencari DTW yang masih tradisional dan alami, perlu dimanfaatkan sebaik-sebaiknya bagi pengembangan pariwisata. Sementara itu berbagai kendala dan tantangan yang ada, terutama masalah rendahnya SDM dan gangguan keamanan yang sering timbul, perlu disiasati dengan berbagai strategi agar kendala dan tantangan tersebut tidak menghambat pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata selain mendatangkan keuntungan secara langsung bagi negara, juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi sejumlah pencari kerja yang belum memiliki kerja, juga diharapkan dapat membuka pasar baru bagi berbagai produk lokal yang dimiliki masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, baik yang tertuang dalam jurnal maupun tesis:

Pattaray (2015) dalam “Pengembangan Ekowisata Bahari di Kawasan GiliBalu Kabupaten Sumbawa Barat”. Penelitian ini membahas tentang potensi kawasanGili Balu sebagai area konservasi yang memiliki ekosistem pulau kecil, pesisir panta,lingkungan bawah laut serta budaya masyarakat Poto Tano Sumbawa

Barat. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata bahari di kawasan Gili Balu dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan berbasis konservasi, sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Gili Balu dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dampak minimal terhadap lingkungan alam dan masyarakat. Dalam penelitian ini diterapkan beberapa strategi yaitu : strategi pengembangan produk wisata, strategi peningkatan keamanan dan memperkuat identitas Pulau Gili Trawangan sebagai destinasi ekowisata bahari, strategi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, strategi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, strategi penetrasi pasar dan promosi daya tarik wisata, serta strategi perencanaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

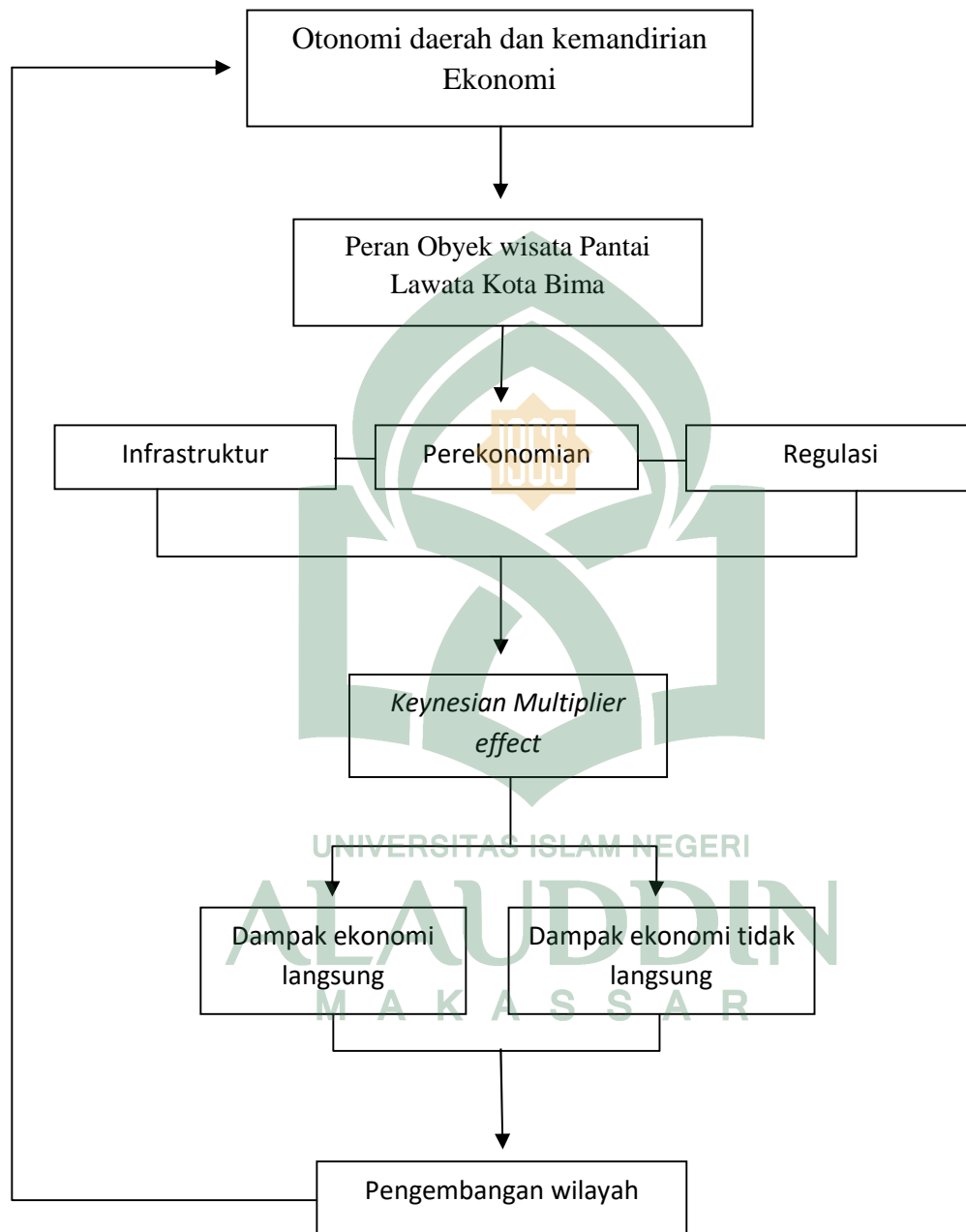
Andi Handoko (2004) Penelitian dilakukan di daerah pesisir selatan Kabupaten Kebumendengan judul *Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi pantai yang belum berkembang di daerah penelitian dan pengaruh sarana jalan terhadap tingkat potensi obyek pantai. Analisa yang digunakan yaitu analisis data primer dan data sekunder, dengan klasifikasi potensi internal dan eksternal. Faktor ketersediaan sarana transportasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap perkembangan obyek wisata pantai di Kabupaten Kebumen.

Nandi (2008) dalam penelitiannya berkesimpulan pemanfaatan, pengembangan, pengelolaan dan pembiayaan kawasan wisata harus mendapat

perhatian yang serius dari pemerintah dengan melibatkan peran lembaga-lembaga pemerintah, stakes holder yang terkait serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kebijakan dan program yang akan diambil. Dalam makalah tersebut pembahasan mengenai kawasan wisata lebih difokuskan pada penguraian konsep dan praktek *good governance*, proses dan prosedur kelembagaan, pembiayaan pembangunan untuk pengembangan sektor pariwisata yang dikaitkandengan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan.



H. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pantai Lawata yang berada di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yakni antara bulan Desember – Januari. Lokasi penelitian ditentukan dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan wisata pantai yang apabila dikembangkan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Bima.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode analisis kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif.

2. Sumber Data

- a. Data Primer diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung pada obyek penelitian. Mengamati keadaan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk

mempengaruhi, mengatur dan memanipulasinya. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pendokumentasian objek Pantai, Fasilitas, dan lain-lain ke lokasi objek wisata Pantai Lawata di Kota Bima.

- b. Data Sekunder Data Sekunder dengan observasi pada instansi terkait dengan yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian, jenis data yang dimaksud meliputi :

- 1) Kondisi fisik Obyek.
- 2) Data demografi, mencakup masalah kependudukan.
- 3) Data ekonomi, mencakup beberapa sektor yang erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata.
- 4) Data sosial budaya, mencakup adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi lapangan adalah suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung di lapangan secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti.
2. Metode Instasional

Metode ini diperoleh dari instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian.

3. Data Dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari data dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar (dokumentasi foto).

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dependen variabel dan independen variabel. Dependen variabel adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan independen variabel adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999). Dependen variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan wilayah di Kota Bima sedangkan independen variabelnya adalah pengembangan wisata pantai Lawata.

Variabel dan Indikator penelitian dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Infrastruktur	Jalan
	Jaringan air bersih
	Telekomunikasi
	Listrik
Perekonomian	PDRB
	Peluang Usaha
	Pendapatan Masyarakat
Regulasi	Pengembangan destinasi wisata
	Pengembangan pemasaran wisata

E. Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.
2. Analisis Multipler Effect (Dampak Berganda)

Analisis *Multiplier effect* adalah proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. *Multiplier* bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Keunikan industri pariwisata terhadap perekonomian berupa dampak ganda (*multiplier effect*) dari pariwisata terhadap ekonomi (Ismayanti dalam Belinda, 2013:13).

Pariwisata memberikan pengaruh tidak hanya terhadap sektor ekonomi yang langsung terkait dengan industri pariwisata, tetapi juga industri yang tidak langsung terkait dengan industri pariwisata. Analisis dampak ekonomi kegiatan wisata terkait dengan elemen-elemen penghasilan, penjualan dan tenaga kerja di daerah kawasan wisata yang terjadi akibat kegiatan pariwisata.

Informasi yang akan ditelusuri sangat terkait dengan hasil analisa yang diharapkan. Analisa dampak akan dilakukan pada masing-masing kelompok pelaku kegiatan wisata. Kelompok pertama adalah unit usaha lokal penyedia barang dan jasa untuk kegiatan wisata. Informasi penting terkait dengan dampak ekonomi adalah (1) proporsi perputaran uang yang berasal dari pengeluaran pengunjung ke unit usaha tersebut, (2) proporsi antara kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh unit usaha tersebut, (3) proporsi dari perputaran arus uang terhadap tenaga kerja lokal, *supplier*, investor, pajak, (4) tipe dan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan, dan (5) rencana investasi ke depan. Dari sejumlah informasi tersebut diharapkan dapat diperoleh estimasi mengenai dampak langsung (*direct impact*) dari pengeluaran pengunjung terhadap masyarakat lokal, estimasi biaya sumberdaya yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh pengunjung, serta estimasi mengenai rencana investasi ke depan.

Kelompok kedua adalah tenaga kerja lokal pada unit usaha lokal penyedia barang dan jasa untuk kegiatan wisata. Informasi penting terkait dengan dampak ekonomi adalah (1) jumlah tenaga kerja yang terdapat pada lokasi wisata, (2) jumlah

jam kerja dan tingkat upah, (3) proporsi dari pengeluaran sehari-hari pekerja yang dilakukan di dalam dan di luar wilayah, dan (4) kondisi pekerjaan sebelum bekerja di unit usaha saat ini. Dari data tersebut diharapkan dapat diperoleh estimasi mengenai dampak tidak langsung (*indirect impact*) dan dampak lanjutan (*induced impact*) dari pengeluaran pengunjung. Kelompok terakhir adalah masyarakat lokal, dimana informasi penting terkait dengan dampak ekonomi adalah informasi mengenai manfaat dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan wisata tersebut, kebanggaan di tingkat masyarakat lokal, dan sejauh mana mereka menilai sumberdaya yang tersedia.

Dari keseluruhan informasi responden maka akan diperoleh informasi mengenai pengeluaran pengunjung, serta aliran uang sejumlah dana tersebut yang akan memberikan dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan bagi perekonomian lokal. Dampak ekonomi ini dapat diukur dengan menggunakan efek pengganda atau *multiplier effect* dari arus uang yang terjadi. Dalam mengukur dampak ekonomi kegiatan pariwisata di tingkat lokal, terdapat dua tipe pengganda, yaitu:

1. *Keynesian Local Income Multiplier*, yaitu nilai yang menunjukkan berapa besar pengeluaran pengunjung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
2. *Ratio Income Multiplier*, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar dampak langsung yang dirasakan dari pengeluaran pengunjung berdampak

pada keseluruhan ekonomi lokal. Pengganda ini mengukur dampak tidak langsung dan dampak *induced*.

Secara matematis dirumuskan :

$$\text{Keynesian Income Multiplier} = \frac{D + N + U}{E}$$

$$\text{Ratio Income Multiplier, Tipe I} = \frac{D + N}{D}$$

$$\text{Ratio Income Multiplier, Tipe II} = \frac{D + N + U}{D}$$

Dimana :

E : Jumlah pengeluaran pengunjung

D : Pendapatan lokal yang diperoleh secara langsung dari E (rupiah)

N : Pendapatan lokal yang diperoleh secara tidak langsung dari E (rupiah)

U : Pendapatan lokal yang diperoleh secara *Induced* dari E (rupiah)

Pengukuran multipiler adalah pengaruh pengeluaran tambahan yang diperkenalkan dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut mencakup marginal dari perubahan rata-rata. Di dalam kasus kepariwisataan pengeluaran tambahan pada suatu daerah dapat berbentuk apa saja termasuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan yang sedang berkunjung terhadap barang-barang dan pelayanan, investasi dari luar, pengeluaran pemerintah, contohnya biaya yang dikeluarkan untuk

infrastruktur, mengekspor barang-barang karena dorongan dari pariwisata.

Pengeluaran dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pengeluaran Langsung

Dalam kepariwisataan pengeluaran dilakukan oleh pengunjung pada barang dan pelayanan dalam penginapan, restoran, toko, fasilitas wisata lainnya yang memproduksi barang wisata yang akan diekspor atau investasi dalam pariwisata.

2. Pengeluaran Tidak Langsung

Mencakup transaksi inter bisnis yang mana hasil dari pengeluaran langsung seperti pembelian barang oleh pemilik toko dari *supplier* lokal dan pembelian yang dilakukan oleh *supplier* lokal dari memborong.

3. Pengeluaran Induksi

Pengeluaran induksi merupakan peningkatan pengeluaran konsumen hasil dari pendapatan tambahan pribadi yang dihasilkan dari pengeluaran langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan mengenai Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan adanya dan dikembangkannya Wisata Pantai Lawata ternyata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang berada disekitar pantai Lawata tersebut seperti pedagang, penyedia wahana, tenaga kerja dan sebagainya sehingga bisa meningkatkan Kondisi ekonomi masyarakat yang ada di sekitaran Pantai Lawata tersebut yang terlibat langsung. Kondisi ini ditandai dengan naiknya pendapatan perkapita masyarakat yaitu di atas UMR (Upah Minimum Regional) Kota Bima sebesar Rp. 800.000. Selain itu dengan adanya Pariwisata pantai Lawata ternyata mampu mendorong perkembangan sektor kepariwisataan yang ada di Kota Bima khususnya sektor Jasa dan Industri.
2. Berdasarkan hasil perhitungan *Ratio Income Multiplier* di kawasan wisata Pantai Lawata yaitu sebesar 18,22 artinya peningkatan 100.000 rupiah pengeluaran wisatawan akan mengakibatkan peningkatan masyarakat sebesar 1.822.000 rupiah pada total pendapatan masyarakat yang meliputi dampak langsung, tidak

langsung, dan *induced* (berupa pendapatan pemilik unit usaha, pendapatan tenaga kerja lokal, dan pengeluarannya untuk konsumsi di tingkat lokal). Sehingga pengaruh wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima sangat signifikan hal itu ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. SARAN

Dengan memperhatikan hasil penelitian bahwa kegiatan wisata bahari dalam hal ini Pantai Lawata memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi rumah tangga yang terlibat langsung terhadap aktifitas tersebut. Peningkatan jumlah wisatawan akan meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal atau masyarakat di sekitar kawasan wisata tersebut. Berdasarkan fakta tersebut maka disarankan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima agar dapat meningkatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, kenyamanan dan keselamatan dengan memperbaiki sarana dan prasarana dasar yang sudah ada.
2. Pemerintah dapat meningkatkan kegiatan promosi untuk memperkenalkan wisata alam Pantai Lawata melalui media cetak dan media elektronik.
3. Pemerintah atau pengelola diharapkan lebih proaktif dalam pengembangan wisata Pantai Lawata guna meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

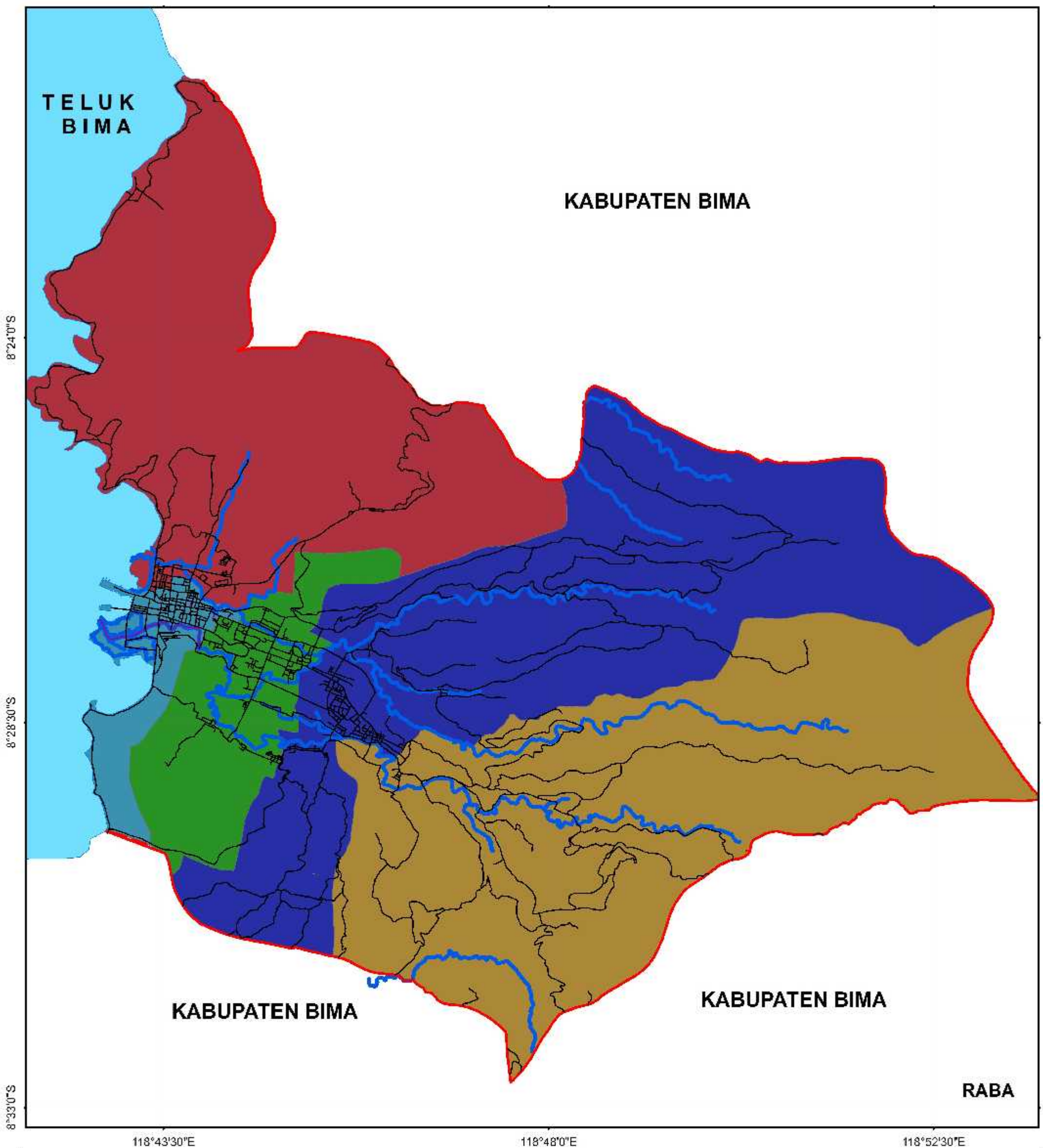
4. Mendorong dan mempermudah masyarakat menggali dan mengembangkan potensi dan peluang usaha dibidang wisata seperti: penambahan bangunan homestay, restoran, toko souvenir, peningkatan kualitas dan keragaman souvenir khas Kota Bima, persewaan peralatan, meningkatkan kualitas pemandu dan jasa transportasi Pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Da'faf, 2004, *Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pantai Sebagai Obyek Wisata dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Lokasi Wisata*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Al-Quranul Karim, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra : Semarang.
- Dilapanga , Mohamad Ridho, ____ , *Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Mengembangkan Potensi Objek Wisata*, [pdf], (<http://journal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/58165349>, diakses tanggal 12 September 2016)
- Fandeli, Chafid. 1995. “*Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*”. Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013.
- Kanuna , Resky Sirupang , 2014, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pendit, Nyoman S, 1994. “*Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*”. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 (Buku II) sub bab 3.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, 3.5.7. Pariwisata (hal 3-138).
- Pitana, I Gede, 1999, “*Pelangi Pariwisata Bali*”, Penerit Bali Post Denpasar: Bali.
- Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Rippda) Kota Bima Tahun 2014-2029
- Robinson, H. 1976. “*A Geography of Tourism*”. MacDonald: London.
- Shihab, M. Quraish. 2002, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidarta, I Wayan T, 2002, *Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Soekadijo, R.G. 1996. “*Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai Systematic Linkage*”. Gramedia: Jakarta.

- Spillane, James J. 1989. *“Ekonomi Pariwisata, Sejarah & Prospeknya”*, Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James.J. 1987. *“Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan ProspeknyaI”*. Kanisius: Yogyakarta.
- Suartha, N., 1994, *“Pengaruh Pariwisata Terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Batubulan Daerah Tingkat II Gianyar”*, Tesis S2, Yogyakarta.
- Sugi, Rahayu., Dewi, Utami, & Fitriana, Kurnia N. 2015. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewayogyakarta*, [pdf], (http://prints.uny.ac.id/363361Sugi%20Rahayu_HB_2015.pdf, diakses tanggal 27 September 2016).
- Sujali, 1989. *“Geografi Pariwisata Dan Kepariwisataaan”*. Yogyakarta :Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *“Dasar-Dasar Pariwisata”*, Yogyakarta: Andi
- Warpani, Suwardjoko, 1984, *Analisis Kota dan daerah*, ITB : Bandung
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.
- Yoeti,Oka A.2008. *“Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata”*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Yuliasri W , Agnes, 2005, *Prioritas Pengembangan Obyek-Obyek Wisata Air Di Kawasan Rawa Pening Kabupaten Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.



KOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



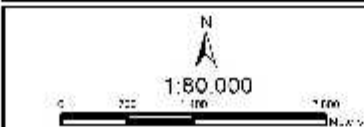
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017

Judul Skripsi :
Pengembangan Wisata Pantai Lawata
dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima

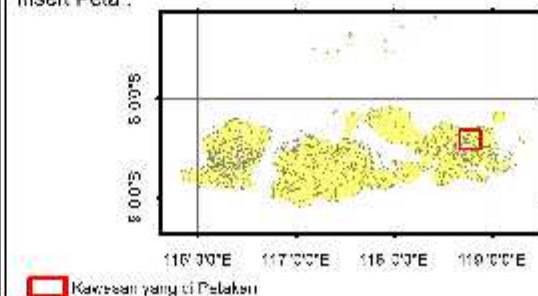
Judul Gambar:
PETA ADMINISTRASI

Legenda :

- | | |
|---------------------|--------------|
| — Batas Kabupaten | TELUK BIMA |
| --- Batas Kecamatan | ASAKOTA |
| — Jalan | MPUNIA |
| — Garis Pantai | RABA |
| — Sungai | RASANA BARAT |
| | RASANA TIMUR |



Insert Peta :



Mahasiswa :
Rizkun Imaddudin (60800112041)

Dosen Pembimbing :

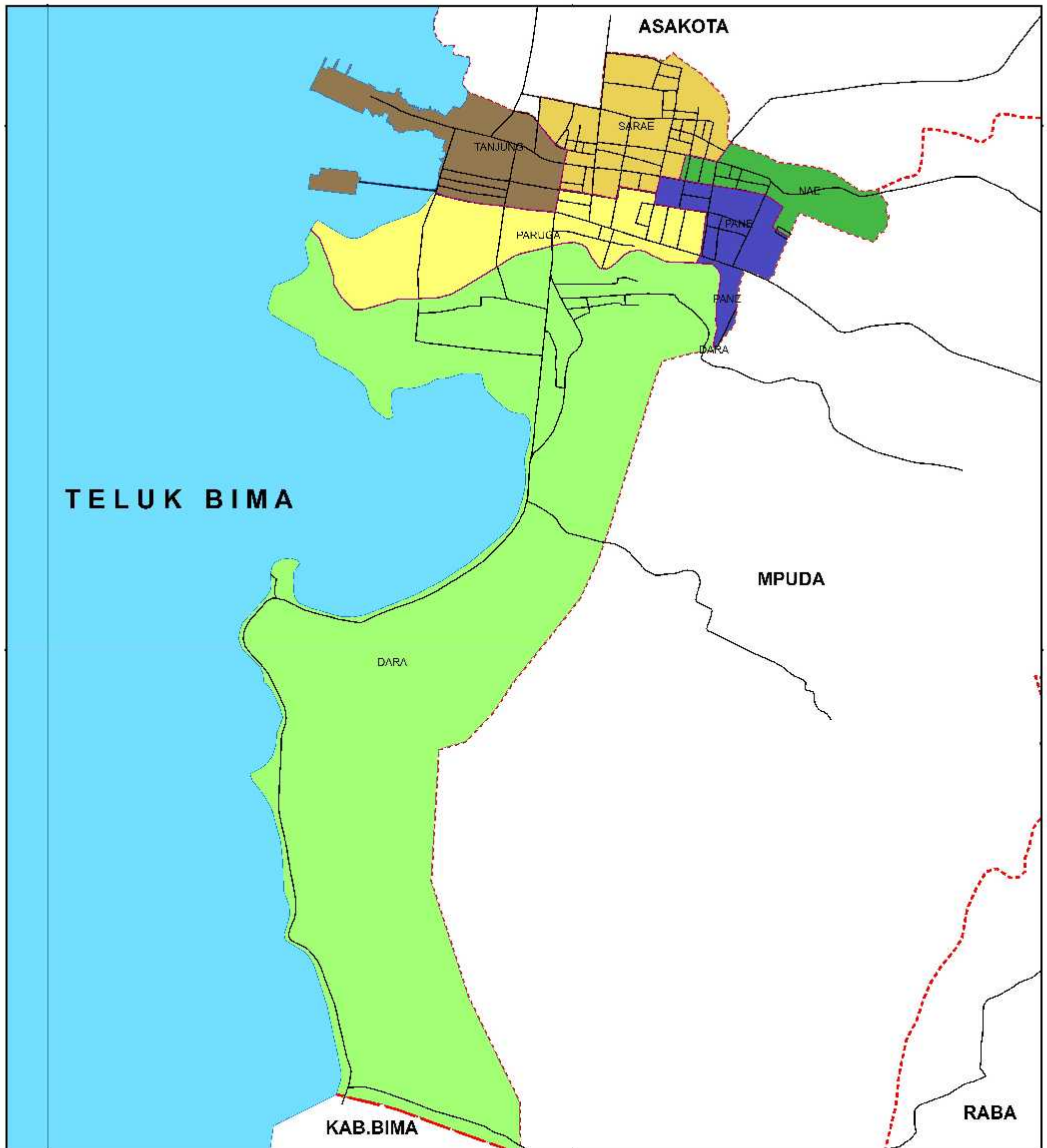
1. Nursyam Aksa, ST, M.Si
2. Risma Handayani, S.IP, M.Si

Sumber Peta :

Foto Udara Tahun 2016
Peta Rupa Bumi Tahun 2012

8°27'0"S

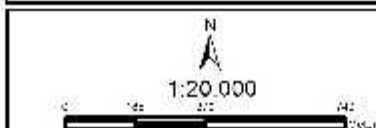
8°28'30"S



KECAMATAN RASANAE BARAT

KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Legenda :**
- | | |
|-----------------------|------------|
| — Batas Kabupaten | Teluk Bima |
| - - - Batas Kecamatan | DARA |
| - - - Batas Desa | NAE |
| — Jalan | PANE |
| — Garis Pantai | PARUGA |
| — Sungai | SARAE |
| | TANJUNG |



Insert Peta :



Mahasiswa :

Rizkun Imaddudin (60800112041)

Dosen Pembimbing :

1. Nursyam Aksa, ST, M Si
2. Risma Handayani, S.IP, M.Si

Sumber Peta :

- Foto Udara Tahun 2016
Peta Rupa Bumi Tahun 2012



TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017

Judul Skripsi :

Pengembangan Wisata Pantai Lawata
dalam Penguasaan Wilayah di Kota Bima

Judul Gambar:

PETA ADMINISTRASI

RIWAYAT HIDUP



Rizkun Imaduddin, Lahir di Bima pada tanggal 21 Januari 1993. Anak Kedua dari 3 Bersaudara dan Merupakan buah hati dari pasangan suami Istri **Nasaruddin, BA** dan **Asni**. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 73 Kota Bima pada tahun 1999 dan menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kota Bima dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Bima pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011. Hingga akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan UMM-PT dan tercatat sebagai Alumni Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4 tahun 11 bulan.

Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu apabila ada kritikan dan saran, pembaca bisa mengirimkan pesan ke alamat email berikut rizkun.imaduddin@gmail.com